

***Etika Sosial dalam Al-Qur'an:
Perspektif Ibnu Khaldun dan Kritik terhadap Pandangan Marx tentang Agama***

¹L. Ibnurusd Al Hafied, ²Samsahudi

¹Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

² Institut Agama Islam Qomarul Huda Lombok, Indonesia

Email: ibnurusdlombok@gmail.com

Abstract

This study provides an in-depth examination of the concept of social ethics as articulated in the Qur'an and the sociological thought of Ibn Khaldūn, while critically engaging with Karl Marx's critique of religion from these perspectives. Confronted with contemporary social challenges such as structural inequality and moral disintegration, it is imperative to revisit ethical values rooted in the Islamic tradition. The Qur'an underscores principles of justice, solidarity, social responsibility, and equality as foundational to a just and prosperous social order. Concurrently, Ibn Khaldūn's theory of 'asabiyyah highlights the centrality of social cohesion in sustaining collective strength. In contrast to Marx's portrayal of religion as an opiate that diverts attention from socio-economic realities, Islam positions faith as a moral force driving social transformation. Employing a qualitative methodology and textual analysis of the primary sources of these three intellectual traditions, this study concludes that integrating Islamic social ethics with Ibn Khaldūn's framework offers a viable conceptual alternative to secular critiques of religion and contributes to the construction of an ethically grounded social paradigm for contemporary society.

Keywords: Social ethics; Qur'an; Ibn Khaldūn; Karl Marx; solidarity; justice.

Abstrak

Penelitian ini membahas secara mendalam konsep etika sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an dan pemikiran Ibn Khaldun, serta mengkaji kritik Karl Marx terhadap agama dari sudut pandang tersebut. Dalam menghadapi tantangan sosial modern seperti ketimpangan dan disintegrasi moral, penting untuk menggali kembali nilai-nilai etis yang bersumber dari tradisi Islam. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip seperti keadilan, solidaritas, tanggung jawab sosial, dan kesetaraan dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Di sisi lain, Ibn Khaldun, melalui konsep *ashabiyyah*, menekankan peran ikatan sosial dalam menopang kekuatan kolektif masyarakat. Berbeda dengan Marx yang memandang agama sebagai instrumen pelarian dari realitas sosial, Islam justru menempatkan agama sebagai kekuatan moral yang mendorong transformasi sosial. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis teks terhadap ketiga pemikiran tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai etika sosial Islam dan pemikiran Ibn Khaldun dapat menjadi alternatif konseptual dalam merespons kritik sekuler terhadap agama serta membangun kerangka etika sosial yang relevan bagi masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Etika sosial, Al-Qur'an, Ibn Khaldun, Karl Marx, Solidaritas, Keadilan

A. Pendahuluan

Dalam realitas masyarakat kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas yang semakin tinggi, umat Muslim dihadapkan pada tantangan sosial yang memerlukan pendekatan menyeluruh dan terpadu. Isu-isu seperti ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan konflik antar kelompok menuntut penyelesaian yang mendasar. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji ulang khazanah etika sosial Islam, terutama yang bersumber dari Al-Qur'an dan pemikiran Ibnu Khaldun. Keduanya menyediakan landasan normatif dan teoritis yang mendalam mengenai nilai-nilai keadilan, solidaritas, serta tanggung jawab sosial yang masih sangat relevan dalam situasi sosial masa kini. Pendalaman terhadap prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan¹.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan perhatian besar terhadap isu keadilan sosial sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Surah An-Nisa ayat 135, umat Islam diperintahkan untuk menjadi pelaku keadilan, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Ayat ini menekankan bahwa tanggung jawab atas keadilan tidak bersifat individual semata, melainkan menjadi kewajiban kolektif yang harus ditegakkan di ruang publik. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an tidak hanya membicarakan keadilan dari sisi hukum formal, tetapi juga menyoroti aspek sosial dan ekonomi, termasuk kewajiban individu untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama². Oleh karena itu, Al-Qur'an berfungsi sebagai rujukan moral yang kokoh dalam pembentukan masyarakat yang adil dan beradab.

Selain wahyu, pemikiran intelektual Muslim klasik turut berperan dalam memperkuat etika sosial. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Ibnu Khaldun, yang dalam karya monumental *Muqaddimah*, memperkenalkan konsep *ashabiyyah* atau solidaritas sosial sebagai elemen vital dalam kelangsungan masyarakat. Menurutnya, kekuatan solidaritas adalah faktor utama yang menentukan stabilitas dan kemajuan peradaban. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki keterikatan sosial yang kuat akan lebih tangguh dalam menghadapi konflik dan perubahan sosial³. Gagasan ini bersinergi dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya tolong-menolong dan membangun jaringan sosial yang kokoh dalam kehidupan kolektif.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu pula diperhatikan pandangan dari luar tradisi Islam, seperti analisis Karl Marx terhadap peran agama. Dalam

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), 94–96.

² Yusuf Al-Qaradawi, *Nilai dan Norma dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 78–83.

³ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, trans. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 2005), 100–105.

pandangannya yang kritis, Marx menyebut agama sebagai "candu masyarakat", yakni sebuah mekanisme yang mengalihkan perhatian publik dari realitas ketidakadilan yang sesungguhnya⁴. Ia berpandangan bahwa agama memberikan penghiburan semu yang pada akhirnya menghambat perjuangan masyarakat melawan struktur yang menindas. Meski demikian, jika dikaji secara lebih dalam, kritik Marx ini tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas pemikiran Islam, yang justru menekankan peran aktif agama dalam memperjuangkan keadilan sosial dan solidaritas. Oleh karena itu, perbandingan antara Al-Qur'an, pemikiran Ibnu Khaldun, dan pandangan Marx menawarkan kerangka analisis yang berimbang untuk menelaah hubungan antara agama dan etika sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis konsep etika sosial sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan gagasan Ibnu Khaldun, serta membandingkannya dengan pendekatan Marx tentang agama. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks akan digunakan untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, karya-karya Ibnu Khaldun, serta literatur akademik mengenai pemikiran Marx. Fokus analisis akan diarahkan pada identifikasi tema-tema kunci dan relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat Muslim kontemporer. Harapannya, kajian ini dapat menghasilkan kontribusi yang konstruktif dalam merumuskan solusi terhadap persoalan sosial yang dihadapi dewasa ini⁵.

Melalui pendekatan interdisipliner ini, studi ini tidak hanya berusaha memperluas pemahaman mengenai etika sosial dalam tradisi Islam, tetapi juga mendorong dialog kritis dengan pemikiran sekuler. Integrasi antara nilai-nilai Al-Qur'an dan pemikiran Ibnu Khaldun diharapkan mampu memberikan wawasan baru mengenai peran agama dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban⁶.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teks yang dikontekstualisasikan terhadap temuan-temuan utama pada etika sosial Al-Qur'an, gagasan *ashabiyyah* Ibn Khaldun, dan kritik Karl Marx tentang agama. Tahap pertama meliputi identifikasi dan pemilihan ayat-ayat Al-Qur'an (misalnya QS. An-Nisā': 135; Al-Mā'idah: 2; Al-Hujurāt: 13) yang memuat prinsip keadilan, solidaritas, tanggung jawab sosial, serta larangan penindasan. Teks ayat kemudian dianalisis bersama pendapat *mufasir* klasik (Ibn Kathīr, al-Qaraḍawī) untuk menegaskan nilai-nilai normatif dan aplikatif. Tahap kedua menelaah bagian-bagian Muqaddimah Ibn Khaldun yang menguraikan *ashabiyyah* sebagai landasan kohesi sosial. Rekonstruksi konsep ini dilakukan melalui kode tematik yang

⁴ Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*, in *Marx: Early Political Writings*, ed. Joseph O'Malley (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 131.

⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 4–6.

⁶ Farid Esack, *The Qur'an: A User's Guide* (Oxford: Oneworld Publications, 2005), 112–115.

mengelompokkan laporan literatur mengenai solidaritas, kohesi komunitas, dan dinamika degradasi solidaritas dalam masyarakat urban⁷. Tahap ketiga melibatkan kajian kritis terhadap teks-teks dasar Marx (*A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right; The German Ideology*) untuk mengidentifikasi argumen agama sebagai “candu masyarakat” dan fungsi ideologisnya. Dengan teknik triangulasi, tema-tema utama dari ketiga sumber keadilan, solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan fungsi agama dibandingkan dan disintesis⁸. Validitas diperkuat melalui perbandingan lintas literatur akademik mutakhir dan refleksi historis-sosiokultural, sehingga metode ini menghasilkan kerangka etika sosial Islam yang sesuai dengan tantangan masyarakat kontemporer.

C. Pembahasan

1. Konsep Etika Sosial dalam Al-Qur'an

Etika sosial dalam Al-Qur'an merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat dengan landasan wahyu. Islam melalui Al-Qur'an tidak hanya mengarahkan umat kepada hubungan spiritual dengan Tuhan, melainkan juga menekankan pentingnya keterlibatan sosial dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat. Nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, tanggung jawab sosial, kesetaraan, dan larangan terhadap penindasan menjadi elemen penting dalam struktur etika sosial Islam, mencerminkan karakter Islam yang menyeluruh dan tidak terpisah antara dimensi ibadah dan muamalah⁹.

Salah satu fondasi utama dalam etika sosial Islam adalah prinsip keadilan (*al-'adl*). Al-Qur'an menyeru umat untuk bersikap adil bahkan dalam keadaan yang menuntut keberpihakan terhadap keluarga atau diri sendiri, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisā' ayat 135. Keadilan dalam pandangan Islam tidak dibatasi pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang menyentuh kesejahteraan kolektif. Para *mufasir* klasik seperti Ibn Kathīr menggarisbawahi pentingnya keadilan yang tidak memihak dalam semua aspek kehidupan¹⁰. Yusuf al-Qaradāwī menambahkan bahwa keadilan sosial berarti adanya pembagian hak dan tanggung jawab yang proporsional di antara semua anggota masyarakat¹¹.

Selain keadilan, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya solidaritas sosial (*takaful*) sebagai fondasi kehidupan bersama. Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2, umat

⁷ Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

⁸ Saldaña, J. (2016). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (3rd ed.). SAGE Publications

⁹ John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), 102–104.

¹⁰ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, vol. 1 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2000), 526–528.

¹¹ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh*, vol. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999), 207–210.

diperintahkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permusuhan. Konsep ini memperlihatkan bahwa kerja sama sosial harus berpijak pada nilai-nilai etis. Bahkan, dalam Surah Al-Mā'ūn, tindakan mengabaikan anak yatim dan orang miskin dikaitkan dengan penolakan terhadap agama. Al-Jalālayn dalam tafsirnya menegaskan bahwa ekspresi keimanan yang sejati terlihat dalam kepedulian sosial¹². Dengan demikian, etika sosial Islam tidak hanya mencakup aspek teologis, tetapi juga menuntut keterlibatan nyata dalam mengatasi problematika sosial.

Selanjutnya, Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Surah Al-Baqarah ayat 177 menampilkan definisi kebajikan yang tidak terbatas pada aspek ritual semata, melainkan juga mencakup kepedulian terhadap kaum lemah melalui pemberian harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. John L. Esposito menilai bahwa Islam mengedepankan etika praksis, di mana iman yang otentik menuntut kontribusi nyata terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan bersama¹³.

Konsep kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia juga menjadi bagian integral dari ajaran etika sosial Al-Qur'an. Surah Al-Ḥujurāt ayat 13 menegaskan bahwa perbedaan etnis dan kelompok bukanlah alasan untuk merasa lebih unggul, sebab kemuliaan di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan. Menurut Abdullah Yusuf Ali, ayat ini merupakan deklarasi universal atas kesetaraan manusia yang menjadi dasar penting bagi solidaritas kemanusiaan¹⁴.

Akhirnya, Al-Qur'an secara eksplisit melarang segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, praktik korupsi dan pengambilan harta dengan cara yang tidak sah disebut sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mohammad Hashim Kamali menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya merupakan tujuan hukum, tetapi juga prinsip etis yang wajib diinternalisasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi¹⁵.

Dari keseluruhan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika sosial dalam Al-Qur'an merupakan panduan normatif sekaligus aplikatif yang menuntut umat Islam untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. Islam mendorong agar aspek spiritual berjalan seiring dengan komitmen sosial, membangun peradaban yang tidak hanya taat secara individual tetapi juga peduli secara

¹² Al-Jalālayn, *Tafsīr al-Jalālayn* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1999), 602–604.

¹³ John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), 87.

¹⁴ Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of the Holy Qur'an*, new edition (Beltsville, MD: Amana Publications, 2006), 1284–1285.

¹⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1999), 105–108.

kolektif terhadap keadilan dan kesejahteraan umum.

2. Perspektif Ibn Khaldun tentang Solidaritas Sosial dan Relevansinya dalam Masyarakat Kontemporer

Pemikiran Ibn Khaldun mengenai solidaritas sosial (*ashabiyyah*) menempati posisi penting dalam kerangka teoritis tentang keberlangsungan dan stabilitas masyarakat. Dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menyatakan bahwa *ashabiyyah* merupakan kekuatan utama yang menjaga kohesi sosial suatu kelompok. Solidaritas ini berfungsi membentuk rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara anggota komunitas, yang pada akhirnya menopang struktur sosial dan politik secara keseluruhan¹⁶. Konsep ini menekankan bahwa ketahanan suatu masyarakat bukan hanya bergantung pada aspek ekonomi atau politik, tetapi pada kekuatan hubungan sosial yang menyatukan anggotanya.

Menurut Ibn Khaldun, solidaritas sosial tidak terbatas pada hubungan kekeluargaan atau kesukuan, melainkan mencakup hubungan yang lebih luas yang dibentuk oleh nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Hal ini memperlihatkan adanya keselarasan antara pemikiran Ibn Khaldun dengan prinsip-prinsip etika sosial dalam Al-Qur'an, yang menyerukan pentingnya saling tolong-menolong dan memperkuat jaringan sosial dalam kehidupan bermasyarakat¹⁷. Keduanya memberikan fondasi filosofis dan normatif untuk membentuk masyarakat yang adil dan harmonis.

Ibn Khaldun mendefinisikan *ashabiyyah* sebagai kekuatan kolektif yang muncul dari ikatan sosial di antara anggota suatu kelompok¹⁸. Ia menegaskan bahwa kekuatan ini sangat penting dalam mempertahankan keberlangsungan peradaban, karena masyarakat dengan solidaritas yang tinggi cenderung lebih tahan terhadap ancaman internal maupun eksternal. Dalam kerangka ini, *ashabiyyah* bukan hanya merupakan fenomena sosiologis, tetapi juga faktor kunci dalam dinamika sejarah dan pembangunan sosial.

Ibn Khaldun juga membedakan antara dua tipe masyarakat—masyarakat badui dan masyarakat kota. Ia menjelaskan bahwa masyarakat badui, yang hidup dalam kondisi alam yang keras dan saling bergantung, memiliki tingkat solidaritas yang lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat kota, yang telah mencapai kemakmuran dan berkembang secara struktural, cenderung mengalami degradasi solidaritas akibat meningkatnya

¹⁶ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, trans. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 2005), hlm. 91–94.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Nilai dan Norma dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 132–137.

¹⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, ed. and trans. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1958), hlm. 97.

individualisme dan ketimpangan sosial¹⁹. Ketika *ashabiyyah* melemah, masyarakat berisiko mengalami disintegrasi sosial dan politik, yang dapat menyebabkan keruntuhan peradaban.

Kritik Ibn Khaldun terhadap individualisme yang berkembang dalam masyarakat kota memberikan relevansi langsung terhadap tantangan sosial dalam masyarakat modern. Ia memperingatkan bahwa tanpa fondasi solidaritas yang kuat, masyarakat rentan terhadap fragmentasi dan konflik sosial⁵. Dalam konteks kontemporer, pemikiran Ibn Khaldun dapat digunakan untuk merefleksikan pentingnya membangun kembali jaringan sosial berbasis kebersamaan dan tanggung jawab kolektif, terutama dalam menghadapi persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan konflik identitas.

Dalam salah satu pernyataannya di *Muqaddimah*, Ibn Khaldun menegaskan bahwa “kekuatan suatu masyarakat terletak pada ikatan sosial yang menghubungkan anggotanya. Tanpa *ashabiyyah*, masyarakat akan kehilangan arah dan tujuan”²⁰. Pandangan ini telah mendapat perhatian dari para peneliti kontemporer. Zainuddin (2018) menyatakan bahwa *ashabiyyah* merupakan fondasi kekuatan sosial-politik yang memungkinkan masyarakat bertahan menghadapi tantangan zaman²¹. Sementara itu, Damanik (2019) menyebutkan bahwa solidaritas sosial sebagaimana dimaknai oleh Ibn Khaldun merupakan kunci bagi pembentukan masyarakat yang berkelanjutan²².

Lebih jauh, relevansi *ashabiyyah* juga terlihat dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial saat ini. Studi bertajuk *Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Interaksi Sosial Siswa* (2020) menemukan bahwa solidaritas sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dan prestasi akademik siswa²³. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *ashabiyyah* tidak hanya terbatas pada struktur sosial makro, tetapi juga memiliki implikasi dalam hubungan sosial mikro. Demikian pula, dalam perspektif hukum Islam, *ashabiyyah* memiliki dimensi normatif yang mencerminkan nilai-nilai etis dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil²⁴.

Dengan demikian, pemikiran Ibn Khaldun mengenai *ashabiyyah* memiliki keterkaitan erat dengan ajaran etika sosial Islam dan tetap relevan dalam menghadapi realitas sosial saat ini. Keselarasan antara nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan teori sosial

¹⁹ Ibid., hlm. 102–105.

²⁰ Ibid., hlm. 110.

²¹ Zainuddin, "Konsep Ashabiyyah dalam Pemikiran Ibnu Khaldun dan Relevansinya dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 12, no. 1 (2018), hlm. 45.

²² Damanik, "Solidaritas Sosial dalam Pemikiran Ibnu Khaldun," *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 7, no. 2 (2019), hlm. 121.

²³ "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Interaksi Sosial Siswa," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 3 (2020), hlm. 207.

²⁴ "Teori 'Ashabiyyah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, vol. 8, no. 1 (2019), hlm. 94.

Ibn Khaldun menawarkan alternatif konseptual untuk membangun solidaritas sosial sebagai respons atas berbagai tantangan kontemporer. Integrasi keduanya tidak hanya memperkaya diskursus ilmiah mengenai etika sosial, tetapi juga memberikan dasar praktis bagi penguatan kohesi sosial dalam masyarakat modern.

3. Reinterpretasi Peran Agama dalam Masyarakat: Kritik terhadap Pandangan Karl Marx melalui Perspektif Etika Sosial Al-Qur'an dan Pemikiran Ibn Khaldun

Pandangan Karl Marx mengenai agama telah menjadi bahan kajian kritis dalam pemikiran sosial modern. Dalam salah satu karyanya yang paling terkenal, *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*, Marx menggambarkan agama sebagai “candu masyarakat.” Ia berargumen bahwa agama berfungsi sebagai pelipur lara yang menutupi realitas penderitaan sosial dan ketidakadilan yang dialami masyarakat. Dalam pandangan Marx, agama memberikan ilusi kenyamanan yang membuat masyarakat menjadi pasif dan enggan menghadapi struktur sosial yang menindas²⁵. Lebih lanjut, Marx menjelaskan bahwa agama merupakan bentuk alienasi, di mana manusia memproyeksikan kondisi sosial yang tidak adil ke dalam entitas transendental. Akibatnya, individu terasing dari realitas dan dari potensi sejatinya sebagai subjek yang bebas²⁶. Dalam *The German Ideology*, Marx bersama Engels menegaskan bahwa agama merupakan instrumen ideologis yang digunakan untuk mempertahankan status quo. Pembebasan sejati, dalam pandangan mereka, hanya dapat dicapai jika manusia mampu membebaskan diri dari ilusi agama²⁷.

Namun, pandangan Marx ini mendapat banyak tanggapan kritis, terutama ketika dihadapkan pada ajaran-ajaran agama yang secara eksplisit mendorong keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Islam, misalnya, Al-Qur'an secara tegas menekankan bahwa keadilan merupakan nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Surah An-Nisa ayat 135, umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan meskipun harus melawan kepentingan pribadi atau kerabat: “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu.*”²⁸. Nilai keadilan dalam Al-Qur'an tidak bersifat partisan atau terbatas pada kelompok tertentu, melainkan bersifat universal dan menjadi tanggung jawab kolektif setiap individu dalam masyarakat. Berbeda dari Marx yang melihat perubahan sosial terutama melalui konflik

²⁵ Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*, trans. Joseph O'Malley (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), hlm. 131.

²⁶ Karl Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, trans. Martin Milligan (New York: International Publishers, 1964), hlm. 42–43.

²⁷ Karl Marx & Friedrich Engels, *The German Ideology* (New York: International Publishers, 1970), hlm. 47.

²⁸ QS. An-Nisa [4]: 135.

antar kelas, Islam mengedepankan transformasi sosial melalui prinsip moral dan tanggung jawab personal yang berlandaskan wahyu²⁹.

Selain itu, agama dalam pandangan Islam tidak diposisikan sebagai pelarian dari kenyataan, melainkan sebagai kekuatan yang menggerakkan masyarakat menuju tatanan yang lebih adil dan manusiawi. Al-Qur'an justru menyerukan keterlibatan aktif dalam memperjuangkan hak dan menolak kezaliman. Agama dalam konteks ini berfungsi sebagai sumber inspirasi moral yang mendorong perubahan sosial yang konstruktif³⁰. Pernyataan Marx bahwa agama menciptakan ilusi kenyamanan dapat dipertanyakan, terutama jika melihat bagaimana agama dapat menjadi motor penggerak solidaritas dan kepedulian sosial. Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*"³¹. Ayat ini menunjukkan bahwa solidaritas dalam Islam berakar pada nilai-nilai spiritual dan bukan semata pada kepentingan material. Ini menjadi pembeda yang mendasar antara solidaritas berbasis nilai dalam Islam dan solidaritas berbasis perjuangan kelas dalam pemikiran Marx.

Pemikiran Ibn Khaldun turut memberikan perspektif yang berbeda terhadap peran sosial agama dan solidaritas. Dalam karyanya *Muqaddimah*, ia memperkenalkan konsep *ashabiyyah*, yakni semangat kebersamaan dan ikatan sosial yang menjadi pilar bagi kelangsungan dan kemajuan suatu masyarakat³². Ibn Khaldun menjelaskan bahwa kelompok sosial yang memiliki solidaritas tinggi akan lebih mampu menghadapi tantangan eksternal dan membangun kekuasaan politik yang stabil. Konsep ini menjadi alternatif terhadap pendekatan Marx yang lebih menekankan pada konflik kelas sebagai mekanisme utama perubahan. Alih-alih melihat konflik sebagai kekuatan transformasional, Ibn Khaldun melihat kerja sama sosial dan kohesi sebagai fondasi bagi kemajuan peradaban³³. Solidaritas dalam konsep *ashabiyyah* juga bersifat inklusif dan berorientasi pada tujuan kolektif yang bersifat konstruktif, bukan destruktif.

Lebih dari itu, Ibn Khaldun juga mengkritik pendekatan materialis yang terlalu menekankan aspek ekonomi dalam menjelaskan dinamika masyarakat. Ia menekankan bahwa nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual memegang peranan penting dalam pembentukan struktur sosial. Dalam hal ini, *ashabiyyah* tidak hanya menjadi alat sosial,

²⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Nilai dan Norma dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 79–82.

³⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 2019), hlm. 45–46.

³¹ QS. Al-Ma'idah [5]: 2.

³² Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, trans. Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 2005), hlm. 103–106.

³³ *Ibid.*, hlm. 117–120.

tetapi juga mencerminkan dimensi etika dan spiritual yang tidak tergantikan oleh pendekatan material semata³⁴. Oleh karena itu, pemikiran Ibn Khaldun dapat dibaca sebagai koreksi atas reduksionisme dalam teori Marx, sekaligus sebagai tawaran konseptual yang lebih holistik dalam memahami masyarakat.

Dalam konteks masyarakat modern, kritik terhadap pandangan Marx menjadi sangat relevan, terutama ketika realitas sosial menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya berbasis material, tetapi juga spiritual dan moral. Agama, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan diteorisasikan oleh Ibn Khaldun, dapat menjadi kekuatan transformatif yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan. Kritik ini tidak semata menolak pemikiran Marx, melainkan memperluas cakrawala pemahaman tentang agama dan etika sosial, dengan menegaskan bahwa peran agama tidak dapat direduksi pada fungsinya sebagai alat ideologi, tetapi sebagai sumber nilai yang membentuk kehidupan sosial yang adil dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyajikan kerangka etika sosial yang kokoh dan menyeluruh, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab kolektif, kesetaraan, dan solidaritas sosial sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Ajaran-ajaran tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi menuntut pelaksanaan praktis dalam kehidupan nyata guna membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga sangat aplikatif untuk merespons berbagai tantangan sosial kontemporer.

Pemikiran Ibn Khaldun, khususnya melalui konsep *ashabiyyah*, melengkapi ajaran Qur'ani dengan memberikan pemahaman historis dan sosiologis mengenai pentingnya solidaritas dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan masyarakat. Solidaritas bukan sekadar ikatan emosional, melainkan merupakan kekuatan kolektif yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan sosial maupun politik. Dalam konteks ini, gagasan Ibn Khaldun selaras dengan semangat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kerja sama, kepedulian sosial, dan kesalingan dalam relasi antarindividu³⁵.

Sebaliknya, pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai pelarian dari realitas sosial yang menindas tampak tidak sejalan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an justru menempatkan agama sebagai pemicu perubahan sosial dan alat untuk menegakkan keadilan serta menolak tirani. Kritik Marx terhadap agama sebagai "candu

³⁴ Ibid., hlm. 138–142.

³⁵ Pramono, M. F., Latief, M., & Rafli, A. S. (2024). *Asabiyyah concept according to Ibn Khaldun: An effort to overcome Islamic political problems in Indonesia*. *PERSPEKTIF*, 13(3), 785–792. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11712>

masyarakat” memang menghadirkan perspektif penting dalam diskursus sosial modern, tetapi dalam konteks Islam, agama menjadi kekuatan pendorong untuk pembebasan dan pemberdayaan sosial, bukan alat alienasi.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan argumen, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara etika sosial Qur’ani dan teori sosial Ibn Khaldun dapat membentuk kerangka konseptual yang utuh dan responsif dalam menghadapi problematika sosial masa kini. Pendekatan ini menawarkan pandangan alternatif terhadap reduksionisme materialistik dalam teori Marx, sekaligus membuka ruang bagi solusi yang lebih humanistik, transformatif, dan berbasis nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai ini, apabila diimplementasikan secara konsisten, berpotensi membentuk tatanan masyarakat yang lebih adil, kohesif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Agustina, A. Y. (2006). *The Meaning of the Holy Qur’an* (11th ed.). Amana Publications.
- Al-Jalālayn. (1999). *Tafsīr al-Jalālayn*. Dar al-Fikr.
- Al-Qarādāwī, Y. (1999a). *Fiqh al-Zakāh*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qarādāwī, Y. (1999b). *Nilai dan Norma dalam Al-Qur’an*. Gema Insani Press.
- Amalih, I., & Al-Haq, H. (2021). Keadilan sosial dalam Al-Qur’an: Tela’ah atas penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *El-Warraqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 5(2). ISSN 2580-4014 (print); 2580-4022 (online).
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Damanik, A. (2019). Solidaritas sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 121.
- Esposito, J. L. (2002). *What Everyone Needs to Know about Islam*. Oxford University Press.
- Friyadi, R. ., & Hanani, S. . (2024). Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Interaksi Sosial Siswa di Sekolah. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1624 – <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1411>
- Ibn Kathīr, I. (2003). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (Vol. 4). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Khaldūn, ‘A. S. (1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
- Kamālī, M. H. (1999). *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Islamic Texts Society.
- Marx, K. (1844). *A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right* (S. Rutland, Trans.). Progress Publishers.
- Marx, K. (1848). *The Communist Manifesto*. International Publishers.

- Marx, K., & Engels, F. (1846). *The German Ideology*. Prometheus Books.
- Purwanto, H., Rofiq, A., & Mashudi. (2020). Halal assurance system (HAS) 23000 perspective George Robert Terry. *IJIBEC: International Journal of Islamic Business and Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i2.2988>
- Pramono, M. F., Latief, M., & Rafli, A. S. (2024). Asabiyyah concept according to Ibn Khaldun: An effort to overcome Islamic political problems in Indonesia. *PERSPEKTIF*, 13(3), 785–792. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11712>
- Saldaña, J. (2016). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Senjaya, T. (2023). Ibn Khaldun's thoughts on religion as a personal experience and a social system. *SCIENTIA: Social Sciences & Humanities*, 2(1), 453–459. <https://doi.org/10.51773/sssh.v2i1.193>
- Zainuddin, Z. (2018). Konsep ashabiyyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansinya dalam masyarakat modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 45.